

Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 3 Pracimantoro

Satrio Indra Febrianoro, Hery Sawiji, dan Patni Ninghardjanti

Pendidikan Ekonomi-BKK Administrasi Perkantoran

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Satrioindra46@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research are (1) to find out the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro in the school year of 2013/2014; (2) to understand the factors affecting the effectiveness of the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro in the school year of 2013/2014; (3) to identify constraints and problems faced in the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro in the school year of 2013/2014; and (4) to find out the solution to the problems in the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro in the school year of 2013/2014.*

Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. (1) In the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro, there were some procedures taken by the school: planning, acting, supervising, evaluating, and reporting. (2) The Factors affecting the effectiveness of the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro referred to the School Budget and Expenditure Income Budget (RAPBS) and BOS Technical Instruction (Juknis). (3) The constraints faced in the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro included internal and external ones. Internal constraints included: a) employee expenditure was limited to maximum 20% of total BOS revenue; b) many student activities funded by BOS so that the fund had not been adequate yet; c) BOS supplementary fund revenue has not been adequate for a year need; d) The activities to improve the quality of teacher such as short course, workshop, technical guide, seminar and BOS fund allocation had not been adequate. The external constraints included: a) Building and road maintenance costs were very high because of labile geographical condition; b) weak social economic condition of parents; c) inadequate learning supporting media in classroom; d) low output of National Standardized Semester Final Examination Score for Elementary School. (4) The solution to deal with the problems in the implementation of School Operational Grant in SMP Negeri 3 Pracimantoro consisted of the solution for internal and the one for external constraints. Solutions to internal constraints were: a) percentage employee expenditure in BOS program should be increased; b) the school was allowed to receive voluntary contribution from students' parent;

c) BOS supplementary fund was increased; d) the activity of improving the teacher quality was limited to or funded with personal fund from the teacher. The solution to external constraints included: a) DAK or blockgrant was required annually; b) the government should open job opportunities and provide productive economic improvement for the poor; c) there should be a special fund aid for procuring the learning media in classroom; d) there should be an improvement of education quality at Elementary School level.

Keywords: Implementation, School Operational Grant

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran yang drastis. Masalah mendasar dalam dunia pendidikan antara lain penerapan kurikulum di sekolah yang kurang tepat. Hal itu seolah-olah sebagai sesuatu yang mutlak sehingga pendidikan kesannya hanya menghasilkan lulusan yang instan dan tidak berkompeten. Peserta didik hanya diajarkan sesuatu yang umum dan keterampilan praktis/instan (tidak mendalam) sehingga tidak memiliki pemahaman yang utuh. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam Ujian Akhir Nasional (UAN), misalnya kecurangan bocornya kunci jawaban dan siswa mencontek.

Masalah lain yang muncul seperti masih banyaknya lulusan sarjana yang tidak terserap di dunia

usaha dan dunia industri. Di pulau timur Indonesia (Papua) masih banyak masalah yang terkait dunia pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan secara tidak langsung menjadi kurang berkualitas, selain itu tenaga pendidiknya pun malah berasal dari kalangan tentara bukan dari lulusan sarjana pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain adalah dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku penunjang, dan alat pelajaran serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas pendidikan sebagaimana tersebut di atas menyangkut beberapa hal, antara lain kualitas peserta didik, guru, kelengkapan sarana dan prasarana

belajar, kurikulum dan strategi pembelajaran.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak akan terlepas dari dukungan atau kerja sama yang bersifat timbal balik antara lembaga formal (sekolah), masyarakat dan keluarga. Tanpa adanya jalinan kerjasama yang saling menunjang dari ketiga komponen tersebut, pencapaian suatu kualitas akan timpang dan terhambat.

Rencana pemerintah untuk mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun saat ini masih banyak mengalami hambatan karena pada kenyataannya masih banyak anak-anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi masyarakat yang rendah, sedangkan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Oleh sebab itulah, banyak anak-anak di Indonesia yang tidak dapat mengikuti pendidikan dikarenakan tidak adanya biaya.

Maka dari itu, pemerintah sampai saat ini masih menggunakan acuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang isinya mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Dalam pembukaan UUD 1945 juga telah dijelaskan salah satu tugas pemerintah yaitu “turut mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya dan fasilitas yang meliputi fasilitas, peralatan, ruangan, dan sarana prasarana yang diperlukan.

KAJIAN LITERATUR

1. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama Rencana Pembangunan Sekolah. Dalam buku “Perencanaan dan Penganggaran sekolah 2013”, RAPBS merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta penanggungjawab perumusan RAPBS, untuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

RAPBS dibuat hanya untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang, dan terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Pengeluaran. RAPBS mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS hanya

mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Menurut Tilaar (2008: 76), Standarisasi dalam manajemen mutu pembelajaran bertujuan untuk menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan. Setiap tahun sekolah perlu membuat RAPBS dimana di dalamnya terdapat pengalokasian sumber pendapatan dan pembiayaan sekolah. Sumber-sumber pendapatan tersebut meliputi bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana masyarakat dan sumber lain.

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan sekolah mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu, tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Secara umum proses manajemen keuangan sekolah

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Bantuan Operasional Sekolah

Sejak Juli tahun 2005 pemerintah menyelenggarakan suatu program yang dinamai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendanaan BOS berdasarkan buku *“Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014”* berasal dari relokasi 20% anggaran subsidi BBM di bidang pendidikan.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Mulyasa (2007: 196), “Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik”.

Menurut PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 331,8 Trilyun

naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 yang hanya Rp 142, 2 Trilyun guna melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45 juta siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan Prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar-mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

a. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu

sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara khusus langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan sarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan akses menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pendidikan biologi, halaman sekolah sekaligus sebagai

lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (E. Mulyasa, 2007: 49).

Menurut Sri Minarti (2011: 251), sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun dan taman.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Iskandar (2009: 176), “Metodologi penelitian merupakan tahapan peneliti menjelaskan cara bagaimana penelitian dapat dilakukan, supaya hipotesis penelitian dapat teruji secara ilmiah dan empirik”. Mulyana (2006: 145) berpendapat, “Metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang

kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban”.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang, artinya hanya ada satu ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada SMP Negeri 3 Pracimantoro dan terpancang pada tujuan penelitian bahwa yang harus diteliti dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih sebelum melaksanakan penelitian. Sumber data diperoleh dari informan, lokasi/tempat penelitian, dan dokumen serta arsip. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dan bola salju (*snowball sampling*). Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi program BOS kegiatan awal yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

1. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro

- a. Tahap pertama dalam implementasi adalah perencanaan. Kegiatan awal yang dilakukan dalam Implementasi program BOS oleh pihak sekolah adalah menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS disusun oleh tim manajemen BOS. Tim manajemen BOS terdiri dari kepala sekolah, guru yang ditunjuk untuk mengelola BOS serta komite sekolah. Dana BOS tidak boleh untuk membiayai semua kegiatan yang ada di RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS apabila ada kegiatan yang tidak boleh dianggarkan

dari dana BOS maka anggarannya akan diambilkan dari dana alokasi khusus atau dari sumbangan sukarela masyarakat.

- b. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan implementasi BOS meliputi beberapa kegiatan diantaranya pendataan jumlah siswa penerima BOS, prosedur/proses pengambilan dana BOS dan penggunaan dana BOS. Pendataan jumlah siswa penerima BOS dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. Prosedur/proses pengambilan dana BOS di Bank, dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Penggunaan dana BOS dalam pelaksanaannya mengacu pada RAPBS dan Juknis BOS.
- c. Tahap ketiga yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi tujuannya untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam

penyaluran maupun penggunaan dana BOS. Pengawasan terkait pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Pracimantoro dilakukan secara intern dan ekstern. Pengawasan secara intern dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan pengawasan secara ekstern dilakukan oleh inspektorat dinas pendidikan dan komite sekolah. Pengawasan dilakukan terkait kegiatan yang didanai oleh dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS, kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

- d. Tahap terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS. Isi laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah tertuang dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap triwulan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro

- a. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah

Pengelolaan dana BOS akan efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sudah dirapatkan dan dirumuskan bersama tim manajemen BOS untuk satu tahun pelajaran. Tujuannya adalah bahwa anggaran yang telah digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Dalam RAPBS mencakup gambaran prioritas kebutuhan sekolah secara rinci mulai dari sumber dana dan pos-pos pengeluaran.

- b. Petunjuk Teknis BOS (Juknis)

Efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan terkait dana bantuan operasional sekolah, berpedoman pada buku petunjuk teknis (juknis) BOS. Dalam Juknis memuat batasan cakupan pos-pos pendanaan. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS, selain itu diharapkan program ini bisa tepat sasaran.

3. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro

a. Kendala Intern

Kendala Intern meliputi: 1) Belanja pegawai dibatasi maksimal 20% dari keseluruhan penerimaan BOS; 2) Banyaknya kegiatan siswa yang didanai dari BOS sehingga dana belum mencukupi; 3) Penerimaan dana pendamping BOS belum memadai untuk kebutuhan setahun; 4) Banyaknya kegiatan peningkatan mutu

guru seperti diklat, workshop, bintek, seminar sehingga alokasi dana BOS belum mencukupi.

b. Kendala Ekstern

Kendala Ekstern meliputi: 1) Biaya perawatan gedung dan jalan sangat tinggi karena kondisi geografis yang labil; 2) Kondisi sosial ekonomi orang tua masih lemah; 3) Sarana pendukung belajar di ruang kelas masih kurang; 4) Output nilai Ujian Akhir Semester Berstandar Nasional Sekolah Dasar masih rendah.

4. Solusi untuk Mengatasi Permasalahan dalam Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro

a. Solusi Kendala Intern

Solusi kendala intern mencakup: 1) Presentase belanja pegawai pada program BOS ditambah; 2) Sekolah diperbolehkan menerima sumbangan sukarela dari orangtua siswa; 3) Dana

pendamping BOS ditambah; 4) Kegiatan peningkatan mutu guru dibatasi atau dibiayai pribadi guru sendiri.

b. Solusi Kendala Ekstern

Solusi kendala ekstern mencakup: 1) Perlu bantuan DAK atau blockgrant setiap tahun; 2) Pemerintah membuka lapangan kerja dan bantuan peningkatan ekonomi produktif bagi rakyat miskin; 3) Perlu bantuan dana khusus untuk pengadaan sarana pembelajaran dikelas; 4) Perlu peningkatan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan; (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi dana

Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro mengacu pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Petunjuk Teknis BOS (Juknis); (3) Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro yaitu kendala intern dan kendala ekstern. Kendala Intern meliputi: a) Belanja pegawai dibatasi maksimal 20% dari keseluruhan penerimaan BOS; b) Banyaknya kegiatan siswa yang didanai dari BOS sehingga dana belum mencukupi; c) Penerimaan dana pendamping BOS belum memadai untuk kebutuhan setahun; d) Banyaknya kegiatan peningkatan mutu guru seperti diklat, workshop, bintek, seminar sehingga alokasi dana BOS belum mencukupi. Kendala Ekstern meliputi: a) Biaya perawatan gedung dan jalan sangat tinggi karena kondisi geografis yang labil; b) Kondisi sosial ekonomi orang tua masih lemah; c) Sarana pendukung belajar di ruang kelas masih kurang; d) Output nilai Ujian Akhir Semester Berstandar Nasional Sekolah Dasar masih rendah; (4)

Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pracimantoro terdiri dari solusi kendala intern dan solusi kendala ekstern. Solusi kendala intern mencakup: a) Presentase belanja pegawai pada program BOS ditambah; b) Sekolah diperbolehkan menerima sumbangan sukarela dari orangtua siswa; c) Dana pendamping BOS ditambah; d) Kegiatan peningkatan mutu guru dibatasi atau dibiayai pribadi guru sendiri. Solusi kendala ekstern mencakup: a) Perlu bantuan DAK atau blockgrant setiap tahun; b) Pemerintah membuka lapangan kerja dan bantuan peningkatan ekonomi produktif bagi rakyat miskin; c) Perlu bantuan dana khusus untuk pengadaan sarana pembelajaran dikelas; d) Perlu peningkatan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar.

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri

3 Pracimantoro Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut:

1. Kepada Guru

Dengan adanya BOS ini tentunya guru harus bersikap lebih profesional karena telah mendapatkan peningkatan kompetensi diri dari mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru seperti seminar, *workshop*, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan pelatihan. Guru harus bisa menerapkan apa yang didapatnya tersebut seperti dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif dan kreatif.

2. Kepada Komite Sekolah

Dalam implementasi BOS komite salah satu tugas komite adalah sebagai pengawas. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup

pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas merasa cukup dengan laporan yang ada di atas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawasan melekat dan pengefektifan tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif.

3. Kepada Sekolah

Untuk sekolah sebaiknya bisa lebih kooperatif dan terbuka serta akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS.

4. Kepada Pemerintah

Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau

kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Kepada pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan termasuk efektifitas pengelolaan dana BOS. Peninjauan kembali bukan berarti penghapusan program, tapi pembaharuan desain program BOS bisa menjadi solusi. Bisa saja pemerintah mengatur kembali pendanaan untuk sekolah yang sudah maju secara financial dan juga aturan yang khusus untuk warga Negara yang sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Pemerataan pemberian dana BOS/alokasi dana BOS yang dipukul rata pada semua daerah dianggap tidak efektif, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi dan M. Arifin. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia. 2013. *Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Bantuan
Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2013*. Jakarta:
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
- UU Sisdiknas. 2003. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian
Pendidikan dan Sosial
(Kuantitatif dan Kualitatif)*.
Jakarta: Gaung Persada
Press.
- Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama
Republik Indonesia. 2013.
*Perencanaan dan
Penganggaran Sekolah
Pedoman Penyusunan
Untuk Kepala Sekolah*.
Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
- Mulyasa, E. 2007. *Manajemen
Berbasis Sekolah*.
Bandung: Remaja Rosda
Karya.
- Sri Minarti. 2011. *Manajemen
Sekolah*. Yogyakarta: Ar-
ruzz Media.
- Tilaar, H.A.R. 2008. *Manajemen
Pendidikan Nasional Kajian
Pendidikan Masa Depan*.
Bandung: Rosda Karya.